

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KOTA BATU
2023

KATALOG:4102002.3579



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BATU**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KATALOG:4102002.3579

KOTA BATU
2023



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BATU**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA BATU 2023

No Publikasi : 35790.23.20
Katalog BPS : 4102002.3579
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman : xiii + 48 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kota Batu

Desain Cover:

Badan Pusat Statistik Kota Batu

Diterbitkan Oleh

© Badan Pusat Statistik Kota Batu

Dicetak Oleh:

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Umum:

Thomas Wunang Tjahjo, M.Sc, M.Eng

Penulis:

Ir. Yuniarni Erry Wahyuti, MM

Pengolah Data:

Eka Cahyani, SST

Gambar Kulit:

Ir. Yuniarni Erry Wahyuti, MM

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas perkenan-Nya Publikasi “Indeks Pembangunan Manusia Kota Batu 2023” dapat diselesaikan. Publikasi ini merupakan bagian dari upaya BPS Kota Batu dalam rangka melihat secara garis besar pencapaian kinerja pembangunan Kota Batu yang dibentuk melalui tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak.

Perlu diketahui bahwa publikasi ini menyajikan angka IPM metode baru. Dalam penghitungan IPM metode baru telah dilakukan beberapa perubahan serta penyesuaian IPM baik indikator yang digunakan maupun teknik penghitungannya. Sehingga diharapkan angka IPM metode baru ini lebih valid serta relevan dalam mengukur capaian pembangunan manusia.

Data dan informasi pembangunan manusia Kota Batu yang tersaji dalam publikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat menyusun strategi dan mengupayakan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini. Semoga upaya yang telah dibangun bersama ini membawa manfaat untuk mendukung perwujudan manusia Kota Batu yang semakin berkualitas, produktif, berdaya saing, dan sejahtera.

Batu, Desember 2023
**Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Batu**

Thomas Wunang Tjahjo, M.Sc, M.Eng
NIP. 19700329 199211 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	IV
DAFTAR ISI	Vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	Xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA	3
Indeks Pembangunan Manusia	5
BAB II. METODOLOGI	9
Penentuan Nilai Minimum dan Maksimum	11
Penghitungan IPM Metode Baru	11
Dimensi Kesehatan	12
Dimensi Pendidikan	12
Dimensi Pengeluaran	13
Penghitungan IPM	13
Ukuran Kecepatan IPM	14
Pengklasifikasian Pembangunan Manusia Berdasarkan IPM	14
BAB III. PEMBANGUNAN MANUSIA DI KOTA BATU	17
BAB IV. DIMENSI KESEHATAN	25
BAB V. DIMENSI PENDIDIKAN	31
BAB VI. DIMENSI KEHIDUPAN YANG LAYAK	39
LAMPIRAN.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nilai Minimum dan Maksimum Indikator IPM	11
Tabel 2. Perkembangan Komponen IPM Kota Batu Tahun 2020-2023 ...	21
Tabel 3. Klasifikasi Status Pembangunan Manusia	22

<https://batukota.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	IPM Kota Batu dan Jawa Timur tahun 2020-2023	17
Gambar 2.	Posisi IPM Kota Batu terhadap IPM Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Timur tahun 2023	18
Gambar 3.	IPM dan Pertumbuhan IPM Kota Batu Tahun 2020-2023 ..	20
Gambar 4.	Umur Harapan Hidup (UHH) dan Pertumbuhan UHH Kota Batu Tahun 2020 – 2023	26
Gambar 5.	Posisi Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Batu terhadap UHH Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Timur tahun 2023 ...	27
Gambar 6.	Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pertumbuhan HLS Kota Batu Tahun 2010-2023	32
Gambar 7.	Posisi Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Batu terhadap HLS Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Timur tahun 2023 ...	33
Gambar 8.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pertumbuhan RLS Kota Batu Tahun 2010-2023	34
Gambar 9.	Posisi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Batu terhadap RLS Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Timur tahun 2023 ...	35
Gambar 10.	Pengeluaran per kapita yang disesuaikan dan pertumbuhan PPP di Kota Batu Tahun 2010-2023	40
Gambar 11.	Posisi Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan (PPP) Kota Batu terhadap PPP Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Timur tahun 2023	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batu Tahun 2010-2023	45
Lampiran 2. IPM Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020-2023	46

<https://batukota.bps.go.id>

1

PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA



BAB I.

PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Sebelum tahun 1970, pembangunan semata-mata dipandang hanya sebagai fenomena ekonomi saja (Todaro dan Smith, 2003). Perhatian dunia tertuju pada diskusi tentang pendapatan, modal, pertumbuhan ekonomi, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi. Namun, seiring berjalannya waktu disadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin adanya perbaikan taraf hidup Sebagian besar penduduk. Data empiris menunjukkan bahwa beberapa negara yang mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih menghadapi masalah pengangguran, kemiskinan, dan masalah sosial lain yang berhubungan dengan manusia.

Pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi memang sebuah ukuran yang penting dalam pembangunan. Namun, kedua indikator tersebut belum menjelaskan fakta bahwa tujuan utama pembangunan adalah untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Ada dua alasan yang mendasari hal ini. Pertama, angka pendapatan nasional memang bermanfaat untuk banyak tujuan tetapi tidak mengungkapkan komposisi penduduk atau penerima manfaat nyata. Kedua, penilaian kinerja yang hanya mendasarkan pada indikator pendapatan nasional sering menimbulkan penafsiran yang keliru sebab ada aspek penting lain yang tidak tergambarkan oleh indikator tersebut, seperti akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, akses yang lebih besar ke pengetahuan, mata pencaharian yang lebih aman, kondisi kerja yang lebih baik, keamanan dari tindak kejahatan dan kekerasan fisik, waktu senggang yang memuaskan, dan perasaan ikut serta dalam kegiatan ekonomi, budaya, dan politik.

Secara perlahan konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pembangunan yang hanya terfokus pada ekonomi saja. Konsep pembangunan manusia tidak hanya memperhitungkan aspek pendapatan, tetapi juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan. Konsep pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh

United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 melalui laporan yang berjudul *Human Development Report (HDR)*.

Dalam laporannya UNDP menjelaskan bahwa manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan, bukan hanya input dari pembangunan. Oleh karena itu, tujuan utama dari pembangunan adalah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati umur panjang, hidup sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (UNDP, 1990).

Munculnya gagasan tentang pembangunan manusia yang dikemukakan oleh UNDP pada tahun 1990 memberikan nuansa baru dalam memahami pembangunan. Cara pandang pembangunan manusia berbeda dengan pendekatan pembangunan konvensional seperti pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia, pengembangan sumber daya manusia, kesejahteraan masyarakat atau kebutuhan dasar manusia. Perbedaan cara pandang pendekatan tersebut antara lain:

- Pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang diperlukan dalam pembangunan manusia, tetapi pertumbuhan ekonomi saja tidaklah cukup. Kemajuan manusia dalam masyarakat mungkin saja masih rendah meskipun Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan per kapita tumbuh tinggi, atau sebaliknya.
- Teori pembentukan modal manusia dan pengembangan sumber daya manusia memandang manusia terutama sebagai alat dan bukan sebagai tujuan. Keduanya berfokus pada sisi penawaran, dimana manusia dipandang sebagai sumber daya untuk menghasilkan produksi. Akan tetapi, manusia memiliki nilai lebih dari barang modal untuk kegiatan produksi. Manusia juga merupakan tujuan akhir dan penerima manfaat dari proses ini.
- Pendekatan kesejahteraan masyarakat memandang manusia sebagai penerima manfaat dari proses pembangunan daripada sebagai peserta

di dalamnya. Pendekatan ini lebih menekankan kebijakan distribusi daripada struktur produksi.

-

Pendekatan kebutuhan dasar berfokus pada kelompok barang dan jasa yang dibutuhkan oleh suatu kelompok masyarakat, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, perawatan kesehatan, dan air. Pendekatan ini berfokus pada penyediaan barang dan jasa dibandingkan masalah pilihan manusia.

Indeks Pembangunan Manusia

Sejak tahun 1990, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah menjadi salah satu indikator yang mencerminkan pencapaian kemajuan pembangunan manusia di suatu bangsa. Seperti yang dinyatakan dalam laporan yang dirilis oleh UNDP. Dalam laporan tersebut, 187 negara yang tercakup di dalamnya sudah terukur capaian IPM beserta semua komponen pembentuknya. Secara internasional, terdapat pembagian kelompok negara-negara berdasarkan nilai IPM-nya, yaitu kelompok sangat tinggi, kelompok tinggi, kelompok menengah, dan kelompok rendah.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah (UNDP, 1998). Dalam hal ini IPM pada tahun tertentu merupakan gambaran dari upaya pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Demikian juga upaya pembangunan dalam suatu periode dapat diukur dan ditunjukkan oleh besarnya IPM pada awal periode tersebut.

IPM mengukur tingkat pencapaian keseluruhan dari suatu wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup, pengetahuan, dan suatu standar hidup yang layak. Ketiganya diukur dengan angka harapan hidup, pencapaian pendidikan dan pendapatan perkapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. (UNDP: *Human Development Report* 2001).

Lebih lanjut UNDP menyatakan bahwa IPM adalah suatu ringkasan dan bukan suatu ukuran komprehensif dari pembangunan manusia. IPM memang dirancang untuk mengukur tingkat kemajuan sosial ekonomi. Angka IPM hanya

memberi indikasi saja. Tetapi dengan menghitung IPM merupakan langkah yang jauh lebih maju dari pada langkah terdahulu yang hanya terkonsentrasi pada tingkat pendapatan saja.

Tinggi rendahnya nilai IPM dapat menjelaskan program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Namun perlu disadari, perubahan atau peningkatan angka IPM tidak bisa terjadi secara instan. Pembangunan manusia merupakan sebuah proses dan tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Berbeda dengan pembangunan ekonomi pada umumnya, hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan tidak bisa dilihat dalam jangka pendek.

Untuk itu, dalam rangka melihat kemajuan pembangunan dalam jangka menengah, publikasi ini dilengkapi dengan analisis mengenai capaian dan kemajuan IPM dan komponen IPM selama tahun 2010-2022. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan potret atau profil suatu wilayah baik secara komprehensif maupun secara sektoral berdasarkan capaian pembangunan manusianya. Analisis deskriptif pembangunan manusia yang disajikan merupakan gambaran tentang keadaan pembangunan manusia, yaitu gambaran yang tidak saja berkaitan dengan gambaran capaian tentang kesejahteraan dan kualitas fisik sumber daya manusia, tetapi juga gambaran yang berkaitan dengan berbagai aspek sosial dari penduduk.

Dengan adanya penggambaran ini pengambil keputusan dan perumus kebijakan akan dapat bekerja secara lebih mendasar dan lebih terarah. Penentuan prioritas misalnya dapat dilakukan secara lebih mudah, oleh karena berbagai informasi yang diperlukan pada proses perencanaan pembangunan telah tersedia.

2

METODOLOGI



BAB II. METODOLOGI

Indeks Pembangunan Manusia diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh salah satu organisasi internasional di bawah naungan PBB, yaitu UNDP (*United Nation Development Programme*). Pada waktu itu, indeks komposit ini dihitung menggunakan pendekatan tiga dimensi, yakni dimensi umur panjang dan hidup sehat (angka harapan hidup saat lahir), dimensi pengetahuan (angka melek huruf dewasa) dan dimensi standar hidup layak (PDB Per kapita). Ketiga dimensi tersebut kemudian dihitung dengan menggunakan rata-rata aritmatik sehingga diperoleh suatu Indeks Pembangunan Manusia.

Pada tahun 2010, atas dasar rekomendasi dari para ahli, UNDP merubah metodologi penghitungan IPM. Sehingga untuk selanjutnya disebut sebagai IPM Metode Baru. Dalam metodologi baru, IPM dihitung dari dimensi yang sama namun dengan indikator yang telah diperbaharui sesuai kondisi kekinian yang lebih relevan. Perubahan utama dalam metode penghitungan IPM adalah perubahan pada variabel angka melek huruf dan PDB per kapita dan perubahan metode penghitungan dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Indikator Angka Melek Huruf (AMH) diyakini sudah tidak tepat lagi dijadikan sebagai salah satu tolak ukur pembangunan manusia dari segi kualitas pendidikan. Hal ini dikarenakan pada saat sebelum perubahan metode IPM, AMH di beberapa wilayah di Indonesia sudah tinggi dan tidak lagi dapat menjadi pembeda antar wilayah. Dengan demikian dianggap bahwa AMH adalah variabel yang tidak sensitif membedakan, dan dalam hal indeks komposit, variabel ini menjadi tidak relevan lagi untuk digunakan pada dimensi pendidikan untuk menghitung IPM.

Indikator kedua yang diganti dalam perubahan metode IPM adalah PDB per kapita. Indikator ini sewajarnya memberi gambaran tentang perkiraan pendapatan masyarakat. Namun yang terjadi adalah dikarenakan PDB terbentuk dari seluruh faktor produksi, baik yang berlangsung dari dalam negeri hingga dari adanya investasi asing. Dalam arti, nilai tambah yang dihasilkan

masih dinikmati oleh nonresiden sehingga masih bruto. Kenyataannya, tidak semua pendapatan dari faktor produksi yang terlibat dalam PDB akhirnya dapat dinikmati oleh masyarakat dalam negeri secara luas. Sehingga disimpulkan bahwa PDB per kapita menjadi tidak sesuai untuk mencerminkan kesejahteraan suatu masyarakat di suatu wilayah. Oleh sebab itu, indikator yang terdapat dalam dimensi standar hidup layak digantikan dengan indikator pengeluaran per kapita.

Selain perubahan pada indikator pembentuk IPM, perubahan lainnya yang merombak penghitungan IPM menjadi lebih relevan dengan kondisi terkini adalah penggunaan rumus rata-rata/agregat dari ketiga komponen. Awalnya, IPM dihitung dengan formula rata-rata aritmatik, di mana jika suatu dimensi pembentuk mencapai titik yang rendah dapat ditutupi oleh dimensi lain yang mencapai titik yang tinggi. Atas dasar inilah kemudian metode penghitungan rata-rata ketiga dimensi IPM diganti dengan menggunakan rata-rata geometrik. Pada formula pengganti ini, setiap dimensi berbobot sama dan tidak memungkinkan adanya transfer capaian dari dimensi yang bernilai tinggi ke dimensi yang bernilai rendah.

Indonesia mengaplikasikan metode baru penghitungan IPM tersebut pada tahun 2015 dengan memperhatikan beberapa pertimbangan, di antaranya:

1. Untuk dimensi kesehatan, telah tersedianya data Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir (e_0) hasil proyeksi Sensus Penduduk (SP2010);
2. Pada dimensi pengetahuan, perubahan indikator perlu dilakukan dengan adanya perubahan penimbang (*weight*) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang menjadi sumber data penghitungan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Cakupan pengukuran RLS juga mengalami perubahan yang sebelumnya mencakup penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi penduduk usia 25 tahun ke atas. Perubahan tersebut mempertimbangkan kondisi masih banyaknya masyarakat yang menempuh pendidikan rantang usia 15 – 25 tahun;
3. PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga didekati dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan menggunakan data Susenas; Penentuan nilai maksimum dan minimum

menggunakan Standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah sebagai acuan.

Penentuan Nilai Minimum dan Maksimum

Dalam penghitungan IPM, setiap komponen distandarisasi dengan nilai maksimum dan minimum. Penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan standar UNDP untuk masing-masing indikator. Untuk standarisasi kebutuhan hidup layak menggunakan nilai rupiah sehingga dapat dibandingkan secara nasional. Tabel di bawah menyajikan standar nilai maksimum dan minimum tersebut.

Tabel 1. Nilai Minimum dan Maksimum Indikator IPM

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Tahun	20	20	85	85
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PPP)		100 (PPP US\$)	1.007.436 (Rp)	107.721 (PPP US\$)	26.572.352 (Rp)

Keterangan:

- *) daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua.
- **) daya beli maksimum nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2015 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2015.

Penghitungan IPM Metode Baru

IPM merupakan indeks komposit dari tiga dimensi pembangunan manusia, yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dan dimensi

pengeluaran (standar hidup layak). Penghitungan IPM dilakukan dengan menentukan nilai untuk setiap dimensi, kemudian diagregasi.

Dimensi Kesehatan

Dimensi kesehatan diukur dengan menggunakan umur harapan hidup saat lahir (UHH). UHH mencerminkan derajat kesehatan masyarakat sebagai suatu indikator mengenai peluang lama usia hidup. UHH dihitung dari hasil proyeksi Sensus Penduduk SP2010 yang dilakukan secara tidak langsung melalui paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack*. Indeks kesehatan sendiri dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$I_{kesehatan} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{max} - UHH_{min}}$$

Dimensi Pendidikan

Dimensi pendidikan atau bisa disebut juga dimensi pengetahuan diukur melalui dua indikator, yaitu angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah (HLS) atau disebut juga *Expected Years of Schooling* (EYS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang.

Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau disebut juga *Mean Years of Schooling* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Indeks pengetahuan secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Di mana:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

Dimensi Pengeluaran

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan (riil) dengan tahun dasar 2012 sama dengan 100.

Penghitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas di mana 66 komoditasnya merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Adapun Teknik penghitungan paritas daya beli ini menggunakan Teknik Rao. Pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam menghitung *Purchasing Power Parity* (PPP). Sedangkan pada metode baru, dipilih sebanyak 96 komoditas dalam penghitungan PPP dengan pertimbangan bahwa share 27 komoditas (metode lama) terus menurun dari 37,52 persen pada tahun 1999 menjadi 24,66 persen pada tahun 2012. Indeks pengeluaran (standar hidup layak) dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran})_{\min}}{\ln(\text{pengeluaran})_{\max} - \ln(\text{pengeluaran})_{\min}}$$

Penghitungan IPM

IPM dihitung dengan menggunakan rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$$

Pada metode lama, agregasi indeks komposit menggunakan rata-rata aritmatik. Sementara pada metode baru menggunakan rata-rata geometrik. Metode agregasi indeks komposit yang digunakan pada metode baru merupakan penyempurnaan metode lama. Seperti pada penjelasan sebelumnya, rata-rata geometrik memiliki keunggulan dalam mendeteksi ketimpangan dibanding rata-rata aritmatik.

Ukuran Kecepatan IPM

Kecepatan perubahan IPM juga menjadi salah satu fokus dalam pembangunan manusia. Pada metode lama, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan reduksi shortfall. Pada metode baru, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan pertumbuhan aritmatik.

Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian pada periode sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, maka dapat dikatakan IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya semakin cepat.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Di mana:

IPM_t : adalah IPM suatu wilayah pada tahun ke-t;

IPM_{t-1} : adalah IPM suatu wilayah pada tahun ke-t-1;

Pengklasifikasian Pembangunan Manusia Berdasarkan IPM

Untuk mengklasifikasikan capaian pembangunan manusia suatu wilayah diperlukan sebuah ukuran yang mampu membedakan tingkat capaian pembangunan manusia antar wilayah. Pengklasifikasian pembangunan manusia ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

Adapun capaian IPM suatu wilayah dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Sangat tinggi (Angka IPM lebih dari atau sama dengan 80)
2. Tinggi (Angka IPM lebih dari atau sama dengan 70 dan kurang dari 80)
3. Sedang (Angka IPM lebih dari atau sama dengan 60 dan kurang dari 70)
4. Rendah (Angka IPM kurang dari 60)

3

PEMBANGUNAN MANUSIA DI KOTA BATU

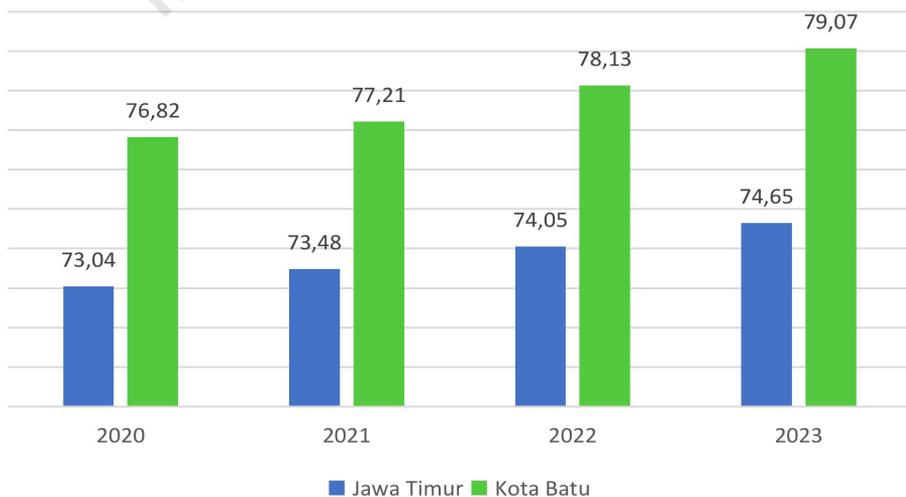


BAB III. PEMBANGUNAN MANUSIA DI KOTA BATU

Pembangunan manusia di Kota Batu dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal tersebut ditunjukkan dari kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebagai salah satu indikator *outcome* pembangunan, IPM tidak hanya meninjau satu bidang saja, tetapi juga lebih jauh mengenai kaitan antara bidang sosial dan ekonomi di Kota Batu.

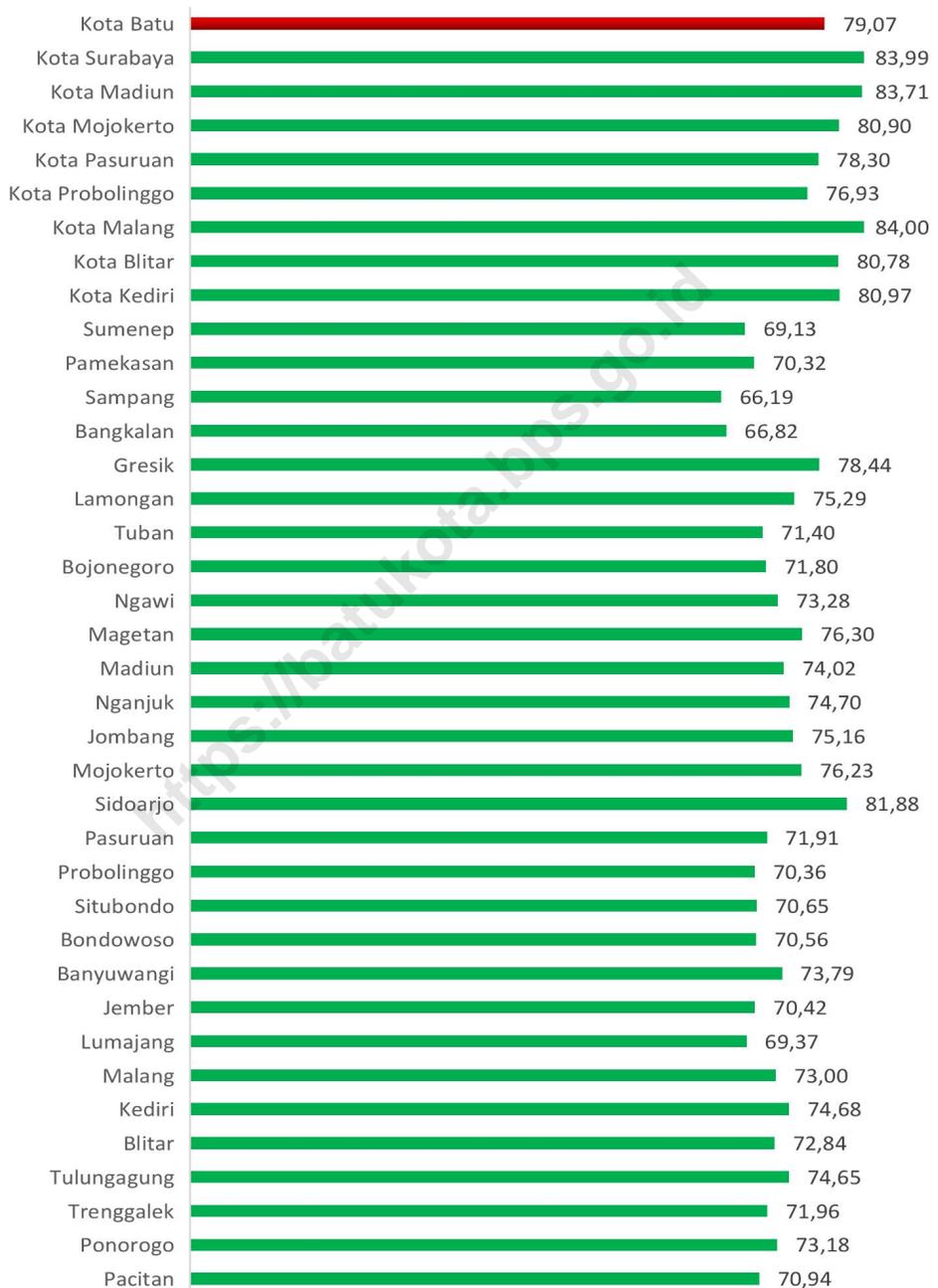
Pada tahun 2023, IPM Kota Batu mencapai 79,07 atau meningkat sebesar 1,20 persen jika dibandingkan pada tahun 2022 yang sebesar 78,13. Kecepatan pembangunan manusia di Kota Batu terlihat lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu meningkat sebesar 1,20 persen. Hal ini menunjukkan bahwa, terjadi peningkatan laju pembangunan manusia di Kota Batu yang relatif tinggi.

Gambar 1. IPM Kota Batu dan Jawa Timur tahun 2020-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2. Posisi IPM Kota Batu terhadap IPM Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Timur tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik

Indeks Pembangunan manusia di Kota Batu tahun 2023 termasuk dalam kategori “tinggi”, meskipun pada tahun sebelumnya laju pertumbuhan agaknya melambat, terutama pada tahun 2020 hingga 2021, sebagai dampak pandemi Covid-19 yang menerpa Kota Batu sejak Maret 2020. Pandemi tersebut berdampak negatif terhadap pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan sehingga indeks pengeluaran juga mengalami penurunan pada tahun 2020, dan baru kembali meningkat di tahun 2021.

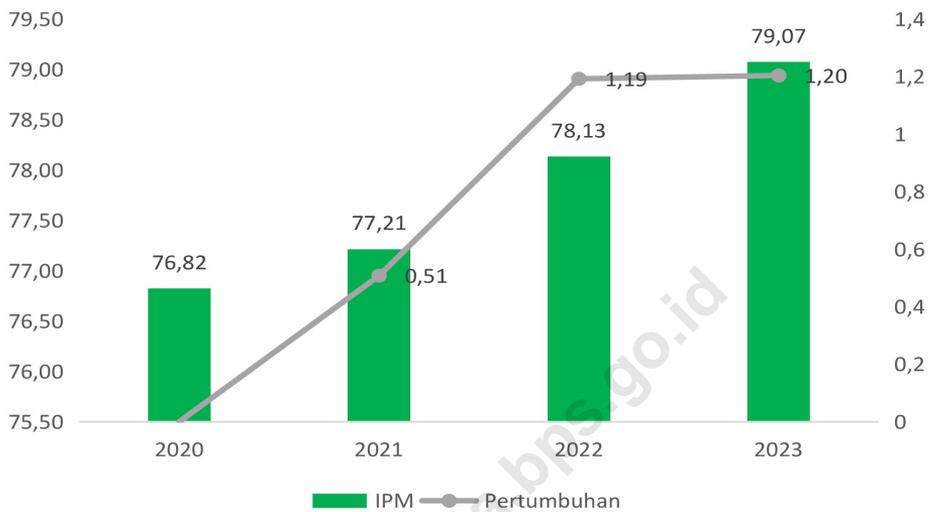
Pada tahun 2023, IPM Kota Batu lebih tinggi dibandingkan IPM Jawa Timur yang sebesar 79,07. IPM Kota Batu berada pada urutan ke-8 diantara kabupaten/kota lain di Jawa Timur. IPM tertinggi dicapai oleh Kota Malang, dengan nilai 84,00. Sementara IPM terendah berada di Kabupaten Sampang, yaitu sebesar 66.19

IPM Kota Batu berada pada peringkat ke-8, dibawah , Kota Malang (84,00), Kota Surabaya (83,99) Kota Madiun (83,71), Kabupaten Sidoarjo (81,88), Kota Kediri (80,97), Kota Mojokerto (80,90) dan Kota Blitar (80,78), selain Kota Batu, terdapat pula 26 Kabupaten/Kota lain yang juga termasuk dalam kategori IPM “tinggi”. Sementara, hanya terdapat 7 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang sudah mencapai kategori IPM “sangat tinggi”.

Percepatan kualitas pembangunan manusia tidak lagi diukur dari indikator reduksi *shortfall* per tahun, tetapi dilihat berdasarkan pertumbuhan IPM antar waktu. Semakin besar angka pertumbuhan IPM suatu daerah dapat dimaknai semakin cepat pencapaian pembangunan manusia di daerah tersebut.

Pertumbuhan IPM merupakan salah satu cara untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM Kota Batu pada tahun 2023 yang sebesar 79,07 mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya (78,13) sebesar 1,20 persen. Pembangunan manusia di Kota Batu tahun 2023 mulai mengalami pemulihan yang pada tahun sebelumnya pada tahun 2020-2021 menemui hambatan berupa munculnya pandemi Covid-19 yang melanda serta menyebabkan daya beli masyarakat kian tergerus sekaligus mengubah pola dan perilaku konsumsi masyarakat. Secara otomatis, pemulihan tersebut berdampak pada tingkat permintaan dan penawaran pasar, baik barang maupun jasa yang tersedia. Alhasil, kinerja perekonomian Kota Batu yang sebelumnya sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 hingga tahun 2021 kembali membaik di tahun 2023.

Gambar 3. IPM dan Pertumbuhan IPM Kota Batu Tahun 2020-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada dasarnya, kinerja ekonomi dan IPM suatu wilayah diharapkan bukan hanya dinikmati oleh sebagian penduduk saja, melainkan harus bisa dinikmati oleh seluruh elemen masyarakat. Dengan kata lain, kinerja ekonomi dan IPM memiliki daya inklusifitas, yaitu secara bersama-sama mampu menunjukkan derajat sosial dan ekonomi yang lebih baik.

Capaian IPM Kota Batu merupakan agregasi dari tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh indikator angka harapan hidup saat lahir menunjukkan capaian yang bagus. Tahun 2023, rata-rata bayi yang baru lahir diperkirakan dapat bertahan hidup hingga usia 75,14 tahun. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Secara rata-rata, penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota Batu telah menempuh pendidikan hingga 9,85 tahun atau setara dengan lulus SMP. Dalam waktu bersamaan, secara rata-rata anak berusia 7 tahun yang masuk ke jenjang pendidikan diharapkan mampu bersekolah hingga 14,56 tahun atau setara dengan pendidikan Diploma III.

Tabel 2. Perkembangan Komponen IPM Kota Batu Tahun 2020-2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,56	74,59	74,86	75,14
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,13	14,16	14,40	14,56
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,07	9,31	9,63	9,85
Pengeluaran perkapita per tahun (PPP)	Ribu Rp	12.824	12.887	13.094	13.603
IPM		76,82	77,21	78,13	79,07
Pertumbuhan IPM	Persen	-	0,51	1,19	1,20

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tidak kalah penting, standar hidup layak yang diukur melalui indikator pengeluaran per kapita tahun 2023 telah menunjukkan hal yang cukup baik. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kota Batu telah mencapai Rp 13,60 juta rupiah per kapita per tahun, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022. Daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa.

Selain pertumbuhan, status pembangunan manusia juga menjadi salah satu indikator untuk melihat kemajuan pembangunan manusia. Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kategori-kategori yang sama dalam hal pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia Kota Batu mencapai 79,07 pada tahun 2023. Dengan capaian IPM tersebut, Kota Batu berada pada posisi status pembangunan manusia kategori “tinggi”.

Tabel 3. Klasifikasi Status Pembangunan Manusia

Nilai IPM	Status Pembangunan Manusia
(1)	(2)
< 60	Rendah
$60 \leq \text{IPM} < 70$	Sedang
$70 \leq \text{IPM} < 80$	Tinggi
≥ 80	Sangat Tinggi

Sumber: Badan Pusat Statistik

<https://batukota.bps.go.id>

4

DIMENSI KESEHATAN



BAB IV. DIMENSI KESEHATAN

Kesehatan merupakan faktor penting pembangunan manusia dan menjadi dasar bagi pembangunan bidang lainnya. Manusia yang sehat merupakan prasyarat untuk mewujudkan *people centered development*. Mengingat pentingnya peran kesehatan dalam pembangunan manusia serta dalam upaya mewujudkan *people centered development*, maka investasi sumber daya manusia melalui kesehatan harus dilakukan dengan pendekatan siklus hidup (*lifecycle approach*), yang dimulai sejak sebelum bayi itu lahir sampai dengan tumbuh menjadi calon generasi yang sehat.

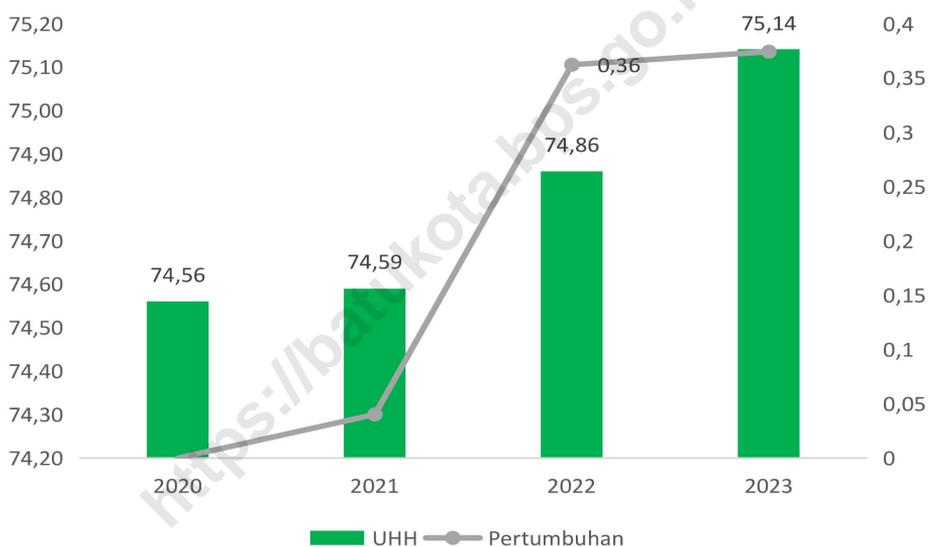
Penanganan masalah kesehatan tidak dapat dilakukan secara sekaligus, mengingat segala keterbatasan yang ada baik menyangkut pendanaan dan sumberdaya yang tersedia. Dengan kondisi seperti itu, maka prioritas program dan kegiatan perlu dilakukan. Penanganan masalah kesehatan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Upaya peningkatan kesehatan bukan semata membangun fasilitas kesehatan, namun perlu diiringi dengan kualitas pelayanan kesehatan yang baik dan menjaga kesehatan lingkungan. Kualitas kesehatan yang baik tidak hanya ditunjang oleh ketersediaan pendanaan yang memadai, namun juga oleh ketersediaan sumber daya tenaga kesehatan yang berkualitas. Tidak sedikit fasilitas kesehatan dibangun, tapi tidak tersedia pelayanan kesehatan karena tidak ada tenaga kesehatan. Selain itu, kualitas pelayanan kesehatan dapat dilihat dari pengelolaan pelayanan kesehatan. Sebagai contoh, dalam hal pemberian pelayanan di rumah sakit umum, perlu dikelola dengan baik sehingga tidak perlu memakan waktu menunggu yang terlalu lama.

Meskipun IPM untuk kesehatan hanya diukur dari Umur Harapan Hidup, karena indikator kesehatan lain lebih sulit untuk diperoleh datanya, namun indikator status kesehatan lainnya perlu dibahas dalam rangka meningkatkan Umur Harapan Hidup. Indikator yang akan dibahas berdasarkan data yang tersedia antara lain morbiditas, penolong proses kelahiran, fasilitas sanitasi, sampai dengan fasilitas dan tenaga kesehatan.

Status kesehatan penduduk diukur dengan berbagai cara, baik langsung maupun tidak langsung. Meski sampai saat ini data untuk mengukur status kesehatan tersebut sulit diperoleh, karena sifat kejadian insidental dan tersebar di masyarakat, sistem registrasi belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, indikator yang digunakan untuk mencerminkan status kesehatan dalam pencapaian IPM adalah Umur Harapan Hidup.

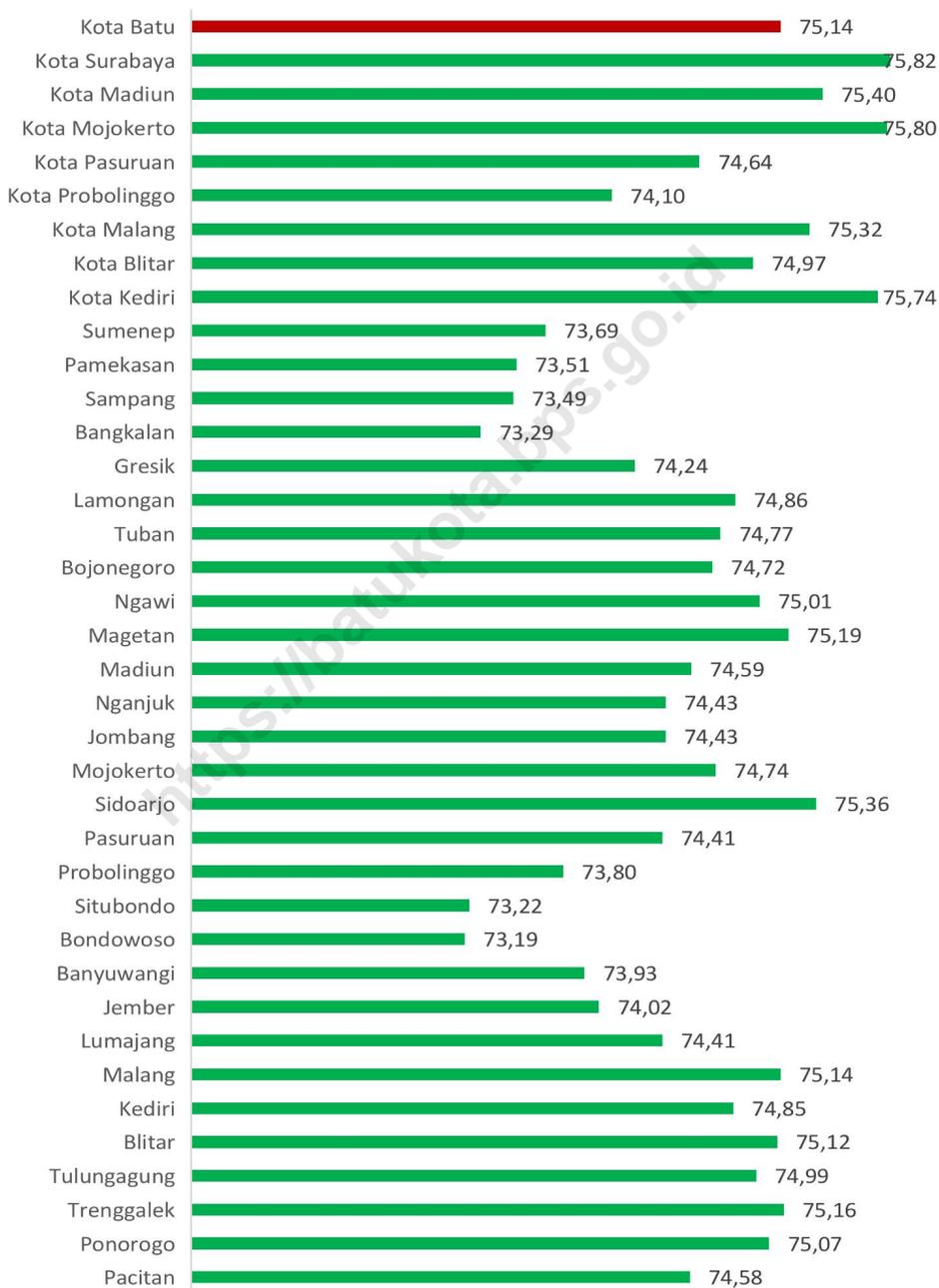
Gambar 4. Umur Harapan Hidup (UHH) dan Pertumbuhan UHH Kota Batu Tahun 2020 – 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Secara umum, Umur Harapan Hidup tinggi akan dicapai jika penduduk mempunyai derajat kesehatan yang baik. Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Batu terlihat terus meningkat dari yang awalnya 74,56 tahun (2020), hingga di tahun 2023 mencapai 75,14 tahun. Artinya, selama rentang waktu empat tahun, umur harapan hidup penduduk Kota Batu telah meningkat sebesar 0,78 persen atau sekitar 0,58 tahun. Pertumbuhan UHH di Kota Batu relatif stabil dari tahun ke tahun.

Gambar 5. Posisi Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Batu terhadap UHH Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Timur tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik

Jika dibandingkan dengan UHH Jawa Timur secara rata-rata yang pada tahun 2023 mencapai 74,87 tahun, UHH Kota Batu masih lebih tinggi. Artinya, penduduk Kota Batu diharapkan dapat hidup lebih lama dibandingkan rata-rata penduduk Jawa Timur pada umumnya. Lebih tepatnya, UHH Kota Batu berada pada posisi ke-9 dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur. Adapun penduduk dengan UHH tertinggi berada di Kota Surabaya (75,82 tahun), sedangkan UHH terendah berada di Kabupaten Bondowoso (73,19 tahun).

Indikator Umur Harapan Hidup berhubungan dengan fasilitas kesehatan yang tersedia di suatu wilayah. Di Kota Batu, seluruh kecamatan telah memiliki fasilitas rumah sakit, puskesmas, klinik dan beberapa fasilitas kesehatan lain yang menjadi rujukan dalam penanganan masalah kesehatan masyarakat. Fasilitas kesehatan tersebut didukung oleh dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, tenaga farmasi, apoteker, dan tenaga gizi yang juga tersedia di masing-masing kecamatan.

Data Susenas tahun 2022 juga menunjukkan bahwa persalinan di Kota Batu seluruhnya sudah ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu dokter kandungan (69,55 persen), dan bidan (30,55 persen). Sedangkan secara rata-rata di Jawa Timur masih terdapat 1,68 persen persalinan yang ditolong bukan oleh tenaga kesehatan, seperti dukun beranak dan lainnya.

Kondisi kesehatan penduduk Kota Batu berhubungan erat dengan kondisi sanitasi di lingkungan perumahan tempat tinggal mereka. Berdasarkan data yang dihimpun BPS pada tahun 2022, tercatat bahwa 96,54 persen rumah tangga telah memiliki fasilitas tempat buang air besar yang digunakan khusus untuk anggota rumah tangga tersebut saja. Sementara di Jawa Timur secara rata-rata sekitar 84,68 persen rumah tangga telah memiliki fasilitas buang air besar sendiri.

5

DIMENSI PENDIDIKAN



<https://batukota.bps.go.id>

BAB V. DIMENSI PENDIDIKAN

Pendidikan atau pengetahuan merupakan komponen penting dalam pembangunan manusia. Indikator-indikator sederhana yang meliputi rata-rata tingkat pendidikan per determinan penting IPM.

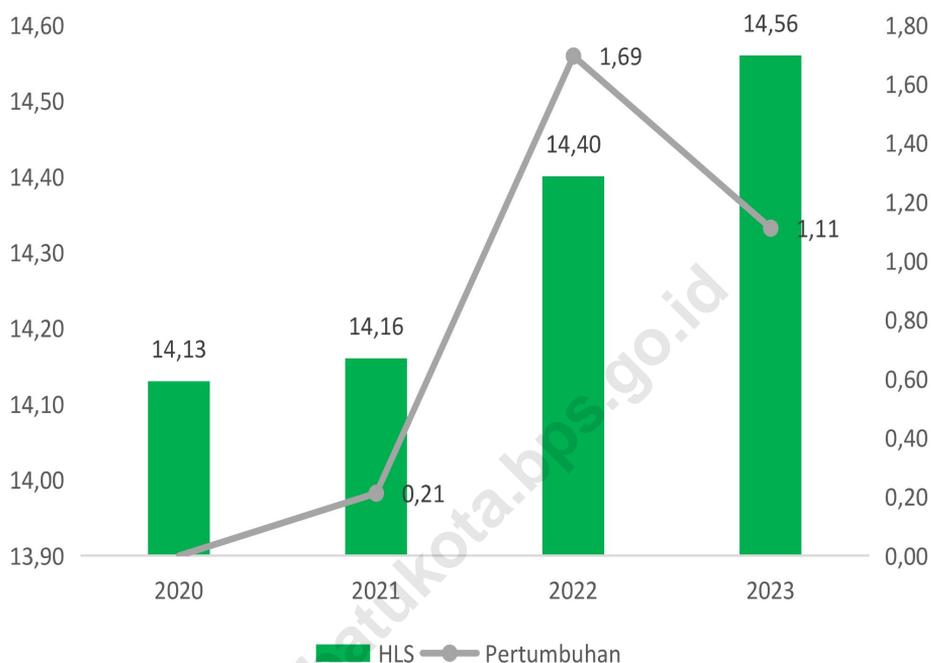
sederhana tersebut berimplikasi dalam hal kesiapan dan kapasitas manusia untuk berperan tidak hanya menjadi obyek pembangunan tetapi juga sekaligus menjadi subyek pembangunan itu sendiri.

Berbagai permasalahan yang melingkupi pendidikan di Jawa Timur saat ini adalah perluasan dan peningkatan kualitas pendidikan. Desakan untuk menjawab tantangan permasalahan ini makin dirasakan setelah Indonesia mengikatkan diri melalui komitmen untuk mencapai sasaran Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's), yaitu menyelesaikan pendidikan dasar dengan mampu membaca, menulis dan berhitung cukup baik untuk memenuhi standar pembelajaran minimum. Demikian juga di Kota Batu untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu dukungan ketersediaan sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan sebagai upaya meningkatkan partisipasi murid secara berkelanjutan.

Harapan lama sekolah (*excpeted years of schooling*) memberikan gambaran lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka rata-rata lama tahun bersekolah (*mean years of schooling*) memberikan gambaran umum secara agregat tingkat pendidikan yang diselesaikan dan tingkat keterampilan penduduk secara umum.

Perkembangan indikator pendidikan Kota Batu terus menunjukkan peningkatan. Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) bergerak dari 14,13 tahun pada tahun 2020, terus meningkat hingga menjadi 14,40 tahun pada tahun 2023 HLS sebesar 14,56 menunjukkan penduduk 7 tahun ke atas di Kota Batu diharapkan dapat bersekolah selama 14,56 tahun, atau setara dengan Diploma III.

Gambar 6. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pertumbuhan HLS Kota Batu Tahun 2020-2023

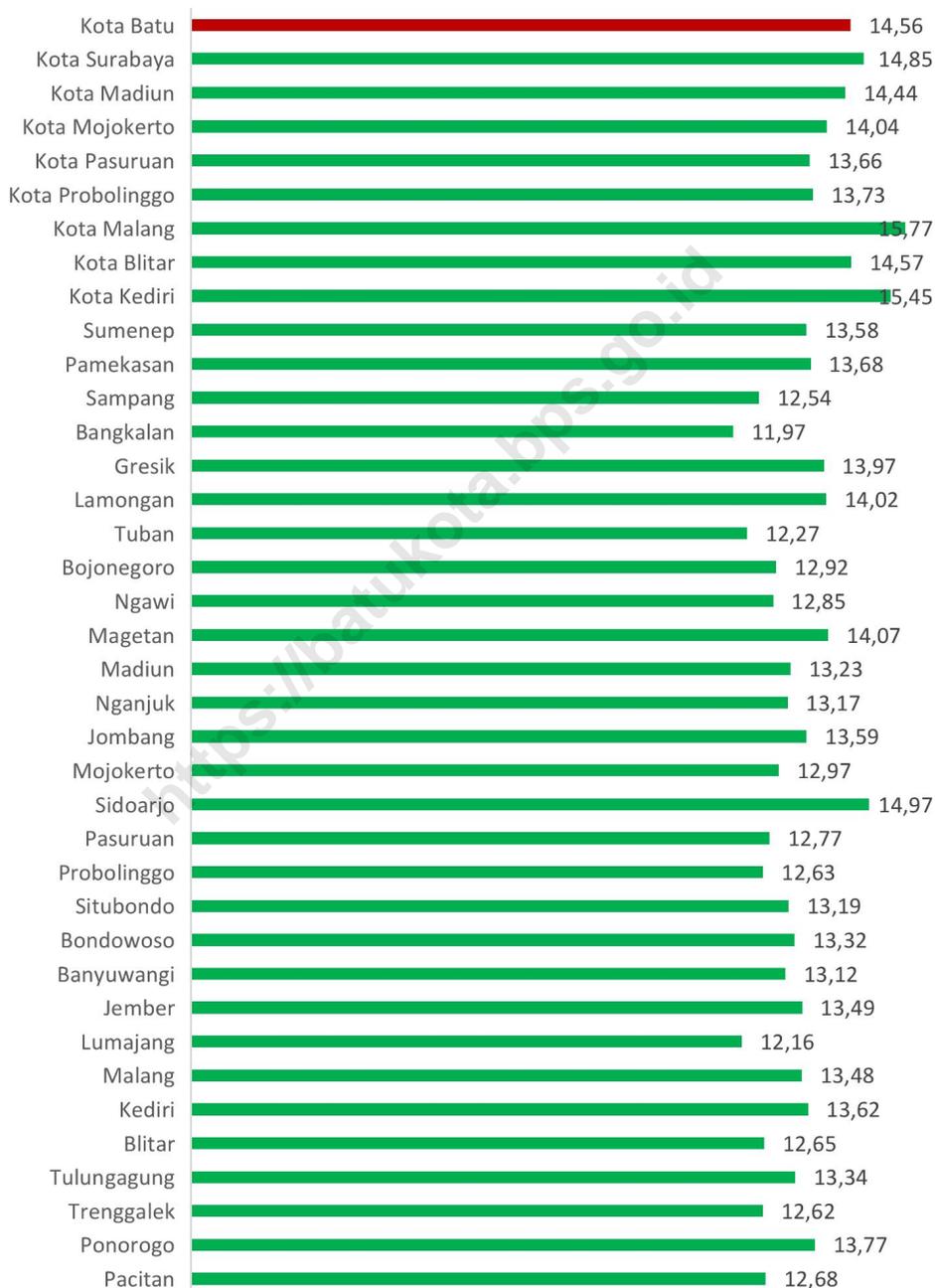


Sumber: Badan Pusat Statistik

Capaian indikator harapan lama sekolah semakin baik dan masih di atas rata-rata Jawa Timur. Pertumbuhan HLS di Kota Batu pada tahun 2023 sebesar 1,11 persen sedikit melambat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 1,69 persen.

Di Jawa Timur, Kota Malang dan Kota Kediri tercatat memiliki HLS tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya, yaitu mencapai 15,77 tahun dan 15,45 tahun. Sementara yang terendah ada di Kabupaten Bangkalan (11,97).

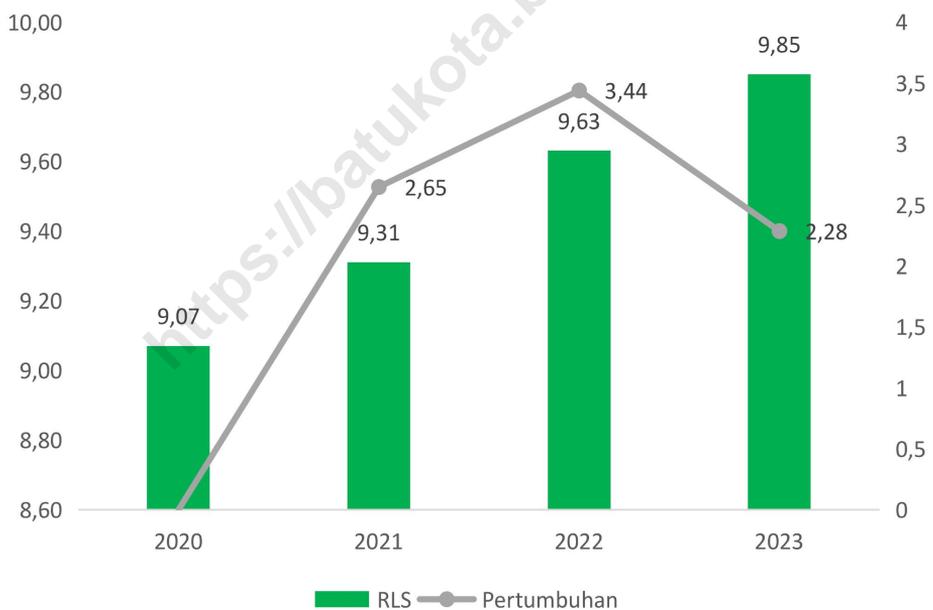
Gambar 7. Posisi Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Batu terhadap HLS Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Timur tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik

Aspek pendidikan Kota Batu juga terlihat pada indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas. Angka RLS Kota Batu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, RLS Kota Batu mencapai 9,85 tahun, artinya rata-rata penduduk Kota Batu bersekolah hingga lulus SMP. Angka ini menunjukkan sudah tercapainya program wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan lama oleh pemerintah. Peningkatan tingkat pendidikan penduduk ini sudah selayaknya perlu ditingkatkan dengan menambahkan program-program pendidikan seperti beasiswa pendidikan dan bantuan untuk siswa dengan keluarga tidak mampu agar bisa terus bersekolah sampai dengan jenjang pendidikan yang tinggi.

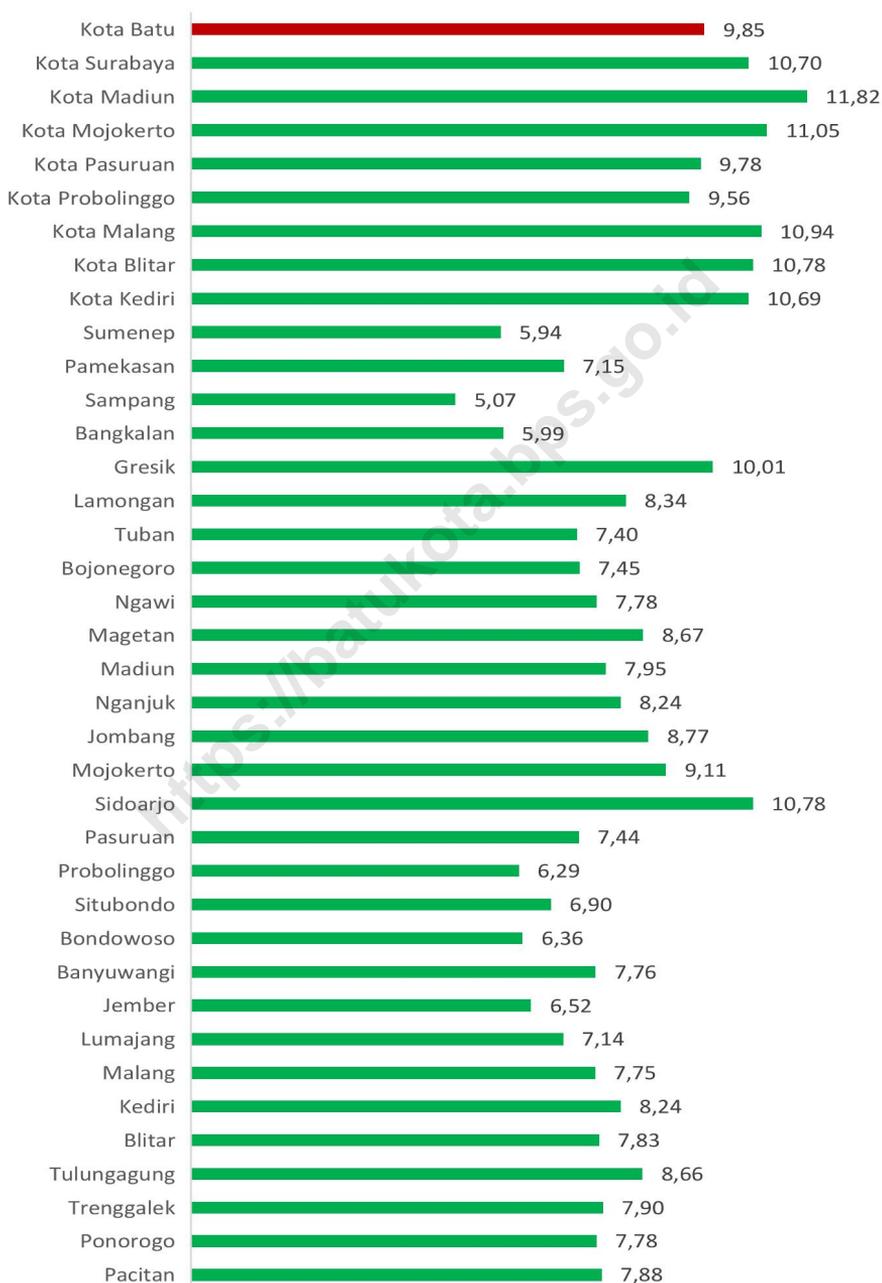
Gambar 8. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pertumbuhan RLS Kota Batu Tahun 2020-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik

Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022, yaitu sebesar 3,44 persen dan terendah tahun 2023, yakni sebesar 2,85 persen. Adapun peningkatan secara kumulatif mencapai 0,78 tahun jika dibandingkan tahun 2020.

Gambar 9. Posisi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Batu terhadap RLS Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Timur tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dilihat dari pencapaian RLS, Kota Madiun dan Kota Mojokerto memiliki RLS tertinggi di Jawa Timur, yaitu mencapai 11,82 tahun dan 11,05 tahun. Sedangkan terendah adalah Kabupaten Sampang (5,07 tahun).

Pemerintah Kota Batu menyadari bahwa hanya dengan penduduk berpendidikan tinggi, Kota Batu akan menjadi daerah yang makmur dan madani. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan pelayanan pendidikan berupaya meningkatkan program pengembangan dan revitalisasi sarana dan prasana pendidikan di seluruh wilayah.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Batu yaitu program bebas buta huruf untuk anak usia sekolah, dan 0 persen untuk angka drop out sekolah. Bagi usia dewasa yang masih buta huruf, diupayakan untuk segera mengikuti paket program belajar atau yang sejenisnya. Salah satunya adalah dengan memberikan pendidikan kejar paket dan vokasi agar *link* dan *macth* dengan kebutuhan lapangan usaha yang tersedia dapat tercapai.

Pemberian Beasiswa dengan sistem zonasi juga agaknya mampu mendongkrak tingkat pendidikan menjadi lebih meningkat, sebab beasiswa zonasi akan mampu menjaga rata-rata pendidikan yang berhasil dicapai sehingga tingkat pendidikan masyarakat Kota Batu lebih meningkat.

6

DIMENSI KEHIDUPAN YANG LAYAK



<https://batukota.bps.go.id>

BAB VI. DIMENSI KEHIDUPAN YANG LAYAK

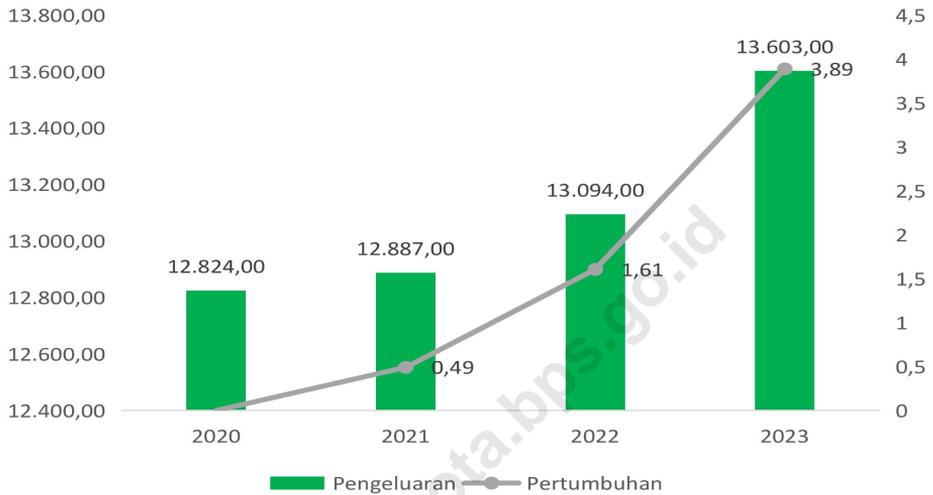
Pembangunan manusia adalah proses untuk memperluas pilihan. Salah satu pilihan tersebut adalah untuk dapat hidup dengan layak dan hidup yang sesuai dengan pilihannya. Dalam bidang pekerjaan misalnya, seseorang ingin mempunyai kemampuan untuk memilih bekerja di lingkungan pemerintahan atau swasta; untuk tempat tinggal bisa memilih di dalam kota yang lebih dekat dengan kantor atau di pinggir kota yang lebih nyaman; untuk transportasi mampu memilih dengan mobil sendiri, atau angkutan umum, dan pilihan berbagai segi kehidupan lainnya.

Pendapatan adalah alat untuk menguasai sumber daya agar dapat hidup dengan layak. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar pula jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk mendukung standar hidup yang layak. Sumber daya atau barang dan jasa itu adalah sebagai wahana untuk meningkatkan kemampuan individu dari segi pendidikan, keterampilan, kesehatan, kemampuan dalam pergaulan di masyarakat, dan lainnya.

Kehidupan yang layak akan memberikan sebuah peluang sekaligus jaminan bahwa penduduk mampu bertahan hidup untuk beberapa waktu kemudian. Dengan memanfaatkan berbagai sektor yang tersedia di Kota Batu, diharapkan kebutuhan dasar setiap penduduk dapat terpenuhi dengan baik. Tidak hanya dalam kebutuhan sandang dan pangan, tetapi juga mampu memberikan ruang hidup nyaman.

Dalam konteks inilah, pendapatan sebagai pendekatan dari tingkat hidup yang layak, dipilih sebagai salah satu indikator pembangunan manusia. Tetapi seringkali data indikator pendapatan ini sangat sulit didapatkan karena seringkali under estimate sehingga diperlukan sebuah indikator lainnya yang dapat mendekati indikator pendapatan ini. Di dalam penghitungan IPM digunakan indikator Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (*Purchasing Power Parity*) untuk mendekati indikator pendapatan.

Gambar 10. Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan dan Pertumbuhan PPP di Kota Batu Tahun 2020-2023 (PPP Ribu Rp)



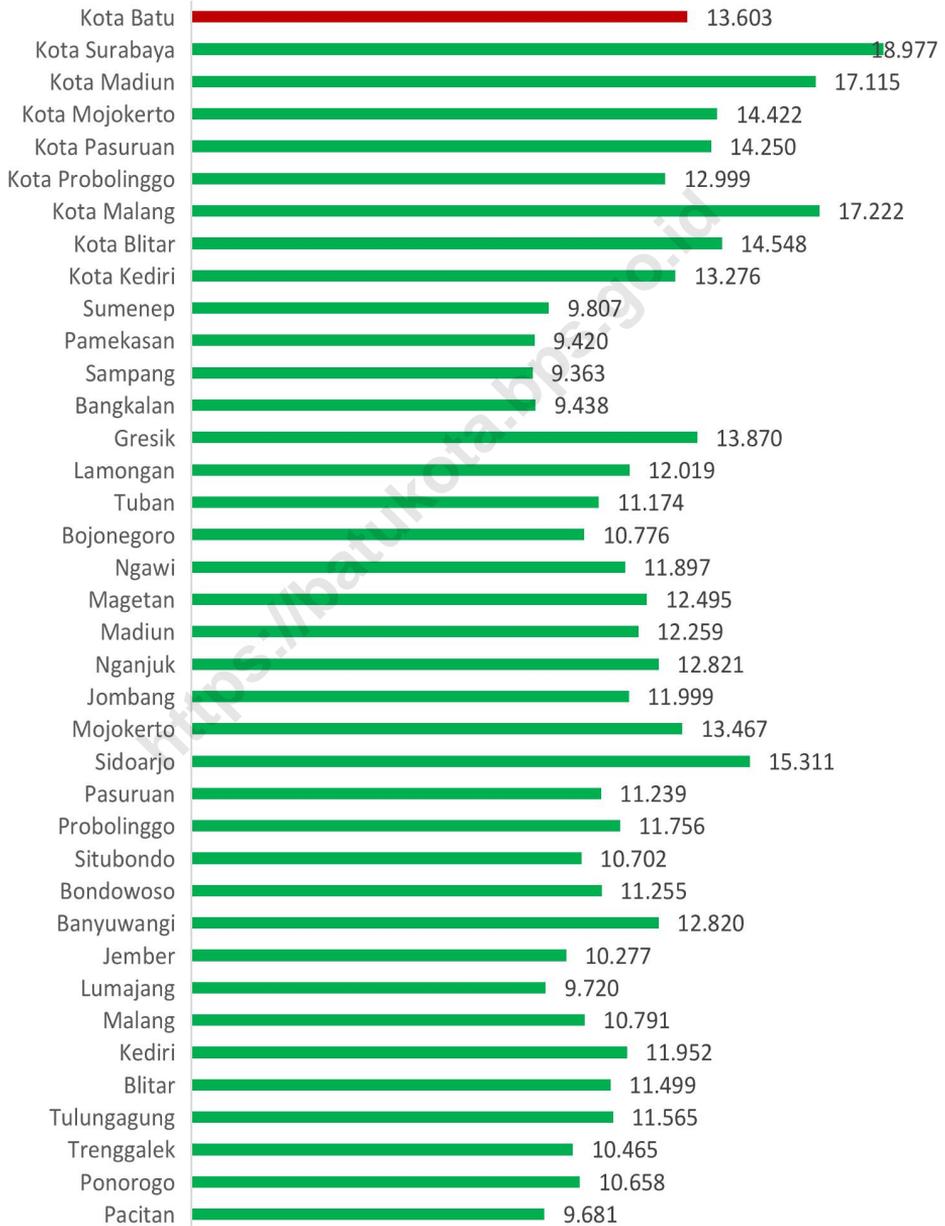
Sumber: Badan Pusat Statistik

Perkembangan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kota Batu sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 terus meningkat. Peningkatan ini mencerminkan bahwa tingkat pendapatan penduduk Kota Batu juga terus meningkat setiap tahunnya.

Pada tahun 2023 pengeluaran per kapita per tahun riil yang disesuaikan mencapai 13,6 Juta per tahun. Ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 13,1 Juta. Pertumbuhan pengeluaran per kapita pada tahun 2023 mencapai 3,89 persen, pertumbuhan ini paling tinggi dalam empat tahun terakhir. Kondisi ini dipicu karena sudah berakhirnya pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia termasuk Kota Batu.

Selama tahun 2023 aktivitas perekonomian di Kota Batu sudah mulai normal kembali seperti sebelum pandemi Covid 19. Kondisi ini meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga daya beli juga ikut meningkat.

Gambar 11. Posisi Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan (PPP) Kota Batu terhadap PPP Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Ribu Rp)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Konsep agropolitan adalah konsep wilayah agraris yang maju didukung oleh pertanian yang modern yang mendukung sektor pariwisata yang diharapkan memberikan *multiplier effect* pada sektor lainnya. Upaya Pemerintah Kota Batu untuk meningkatkan potensi wilayah dengan memajukan pariwisata yang didukung sektor pertanian, tampak dari visinya yaitu” *Desa Berdaya Kota Berjaya terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra Agro Wisata Internasional Yang Berkarakter, Berdayasaing dan Sejahtera*”.

Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita per tahun riil yang disesuaikan tertinggi dicapai oleh Kota Surabaya sebesar 18.977 ribu rupiah dan Kota Malang yang tercatat sebesar 17.222 ribu rupiah. Sedangkan pengeluaran per kapita per tahun riil yang disesuaikan terendah adalah Kabupaten Sampang yakni sebesar 9.363 ribu rupiah.

Secara teori, kemampuan memenuhi kebutuhan secara ekonomi tecermin dari indeks pengeluaran (*purchasing power parity*) atau indeks daya beli. Semakin tinggi indeks ini, semakin baik daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Indeks ini disajikan dalam bentuk pengeluaran per kapita per tahun yang telah disesuaikan.

LAMPIRAN

<https://batukota.bptid.id>

Lampiran 1.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batu Tahun 2020-2023

Tahun	IPM	Pertumbuhan IPM (%)	Angka Harapan Hidup (Tahun)*	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran yg disesuaikan (Ribu Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2020	76,82	-	74,56	14,13	9,07	12.824
2021	77,21	0,51	74,59	14,16	9,31	12.887
2022	78,13	1,19	74,86	14,40	9,63	13.094
2023	79,07	1,20	75,14	14,56	9,85	13.603

*) LF SP 2020

Lampiran 2.
IPM Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022-2023

Kode	Kabupaten/Kota	UHH		HLS		RLS	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
3501	Pacitan	74,35	74,58	12,66	12,68	7,82	7,88
3502	Ponorogo	74,81	75,07	13,76	13,77	7,77	7,78
3503	Trenggalek	74,91	75,16	12,50	12,62	7,89	7,90
3504	Tulungagung	74,73	74,99	13,33	13,34	8,65	8,66
3505	Blitar	74,86	75,12	12,64	12,65	7,82	7,83
3506	Kediri	74,58	74,85	13,61	13,62	8,23	8,24
3507	Malang	74,88	75,14	13,38	13,48	7,68	7,75
3508	Lumajang	74,17	74,41	12,02	12,16	6,87	7,14
3509	Jember	73,79	74,02	13,44	13,49	6,50	6,52
3510	Banyuwangi	73,67	73,93	13,11	13,12	7,66	7,76
3511	Bondowoso	72,98	73,19	13,31	13,32	6,22	6,36
3512	Situbondo	72,99	73,22	13,18	13,19	6,63	6,90
3513	Probolinggo	73,58	73,80	12,58	12,63	6,13	6,29
3514	Pasuruan	74,15	74,41	12,76	12,77	7,42	7,44
3515	Sidoarjo	75,06	75,36	14,95	14,97	10,77	10,78
3516	Mojokerto	74,48	74,74	12,96	12,97	8,97	9,11
3517	Jombang	74,17	74,43	13,58	13,59	8,76	8,77
3518	Nganjuk	74,17	74,43	13,07	13,17	8,12	8,24
3519	Madiun	74,34	74,59	13,18	13,23	7,94	7,95
3520	Magetan	74,92	75,19	14,05	14,07	8,66	8,67
3521	Ngawi	74,76	75,01	12,84	12,85	7,59	7,78
3522	Bojonegoro	74,48	74,72	12,84	12,92	7,43	7,45
3523	Tuban	74,53	74,77	12,24	12,27	7,37	7,40
3524	Lamongan	74,60	74,86	14,01	14,02	8,33	8,34
3525	Gresik	73,96	74,24	13,96	13,97	9,75	10,01
3526	Bangkalan	73,05	73,29	11,91	11,97	5,97	5,99
3527	Sampang	73,24	73,49	12,39	12,54	5,06	5,07
3528	Pamekasan	73,28	73,51	13,67	13,68	6,88	7,15
3529	Sumenep	73,43	73,69	13,51	13,58	5,93	5,94
3571	Kota Kediri	75,44	75,74	15,44	15,45	10,45	10,69
3572	Kota Blitar	74,71	74,97	14,56	14,57	10,65	10,78
3573	Kota Malang	75,06	75,32	15,76	15,77	10,69	10,94
3574	Kota Probolinggo	73,84	74,10	13,67	13,73	9,29	9,56
3575	Kota Pasuruan	74,38	74,64	13,64	13,66	9,67	9,78
3576	Kota Mojokerto	75,53	75,80	14,02	14,04	10,80	11,05
3577	Kota Madiun	75,11	75,40	14,43	14,44	11,67	11,82
3578	Kota Surabaya	75,62	75,82	14,83	14,85	10,51	10,70
3579	Kota Batu	74,86	75,14	14,40	14,56	9,63	9,85
3500	JAWA TIMUR	74,57	74,87	13,37	13,38	8,03	8,11

Lanjutan Lampiran 2

Kode	Kabupaten/Kota	Pengeluaran Perkapita		IPM		Peringkat IPM	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
3501	Pacitan	9.184	9.681	70,19	70,94	29	29
3502	Ponorogo	10.199	10.658	72,59	73,18	22	22
3503	Trenggalek	10.042	10.465	71,28	71,96	26	25
3504	Tulungagung	11.162	11.565	74,14	74,65	17	18
3505	Blitar	11.001	11.499	72,25	72,84	23	24
3506	Kediri	11.565	11.952	74,20	74,68	16	17
3507	Malang	10.326	10.791	72,23	73,00	24	23
3508	Lumajang	9.466	9.720	68,48	69,37	36	35
3509	Jember	9.840	10.277	69,80	70,42	31	32
3510	Banyuwangi	12.320	12.820	73,15	73,79	20	20
3511	Bondowoso	10.851	11.255	69,91	70,56	30	31
3512	Situbondo	10.263	10.702	69,76	70,65	32	30
3513	Probolinggo	11.254	11.756	69,56	70,36	33	33
3514	Pasuruan	10.726	11.239	71,29	71,91	25	26
3515	Sidoarjo	14.808	15.311	81,37	81,88	4	4
3516	Mojokerto	13.051	13.467	75,61	76,23	13	13
3517	Jombang	11.579	11.999	74,66	75,16	15	15
3518	Nganjuk	12.349	12.821	73,95	74,70	18	16
3519	Madiun	11.848	12.259	73,51	74,02	19	19
3520	Magetan	12.031	12.495	75,76	76,30	12	12
3521	Ngawi	11.563	11.897	72,62	73,28	21	21
3522	Bojonegoro	10.323	10.776	71,15	71,80	27	27
3523	Tuban	10.703	11.174	70,79	71,40	28	28
3524	Lamongan	11.648	12.019	74,83	75,29	14	14
3525	Gresik	13.384	13.870	77,62	78,44	10	9
3526	Bangkalan	8.971	9.438	66,11	66,82	37	37
3527	Sampang	8.944	9.363	65,44	66,19	38	38
3528	Pamekasan	8.967	9.420	69,35	70,32	34	34
3529	Sumenep	9.388	9.807	68,49	69,13	35	36
3571	Kota Kediri	12.762	13.276	80,12	80,97	7	5
3572	Kota Blitar	14.058	14.548	80,15	80,78	6	7
3573	Kota Malang	16.897	17.222	83,38	84,00	1	1
3574	Kota Probolinggo	12.571	12.999	76,08	76,93	11	11
3575	Kota Pasuruan	13.803	14.250	77,71	78,30	9	10
3576	Kota Mojokerto	14.054	14.422	80,19	80,90	5	6
3577	Kota Madiun	16.503	17.115	83,02	83,71	3	3
3578	Kota Surabaya	18.345	18.977	83,32	83,99	2	2
3579	Kota Batu	13.094	13.603	78,13	79,07	8	8
3500	JAWA TIMUR	11.992	12.421	74,05	74,65	-	-

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BATU**

Jalan Melati No. 11, Songgokerto - Batu, Telp. - Fax: (0341) 512575
e-mail: bps3579@bps.go.id, website: batukota.bps.go.id